

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN TENTANG
IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN**

TESIS



Oleh

**MOHD. AMIN RAMBE
NPM. 061801079**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2008**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

MOHD. AMIN RAMBE

NPM. 061801079

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2008**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :MPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN

N a m a :MOHD. AMIN RAMBE

N I M :061801079

Menyetujui

Pembimbing I

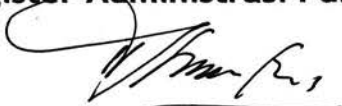


Drs.kariono, MA

Pembimbing II

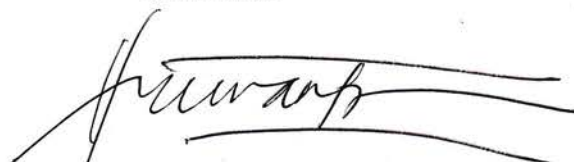
Drs.Done Ali Usman,MAP

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

TELAH DIUJI PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2008

N a m a : MOHD. AMIN RAMBE
N I M : 061801079



PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : WARJIO,SS,MA
SEKERTARIS : Ir. ZOLHERI NOER,MP
PENGUJI I : DRS. KARIONO, MA
PENGUJI II : DRS. DONE ALI USMAN, MAP
PENGUJI TAMU : DRS. USMAN TARIGAN, MS

A B S T R A K

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN

N a m a : Mohd. Amin Rambe
N I M : 061801079
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Kariono, MA
Pembimbing II : Drs. Done Ali Usman, MAP

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata bertujuan menumbuh kembangkan pariwisata baik dari segi ekonomi, profesionalisme dan kebudayaan bangsa serta untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pariwisata di Daerah. Setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata di Daerah wajib memiliki izin dari kepala Daerah. Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala Daerah. Izin sebagaimana berlaku selama kegiatan usaha pariwisata berjalan, dan harus didaftar ulang setiap Tahunnya. Dengan nama retribusi izin usaha pariwisata dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Izin Usaha Pariwisata serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Sampel diambil secara *purposive sampling*, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Izin Usaha Pariwisata sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total skor 2,18, maka termasuk dalam kategori sedang dalam arti bahwa pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Izin Usaha Pariwisata tersebut belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan disebabkan oleh beberapa faktor : antara lain isi kebijakan yang belum dipahami oleh pelaksanan, informasi kebijakan yang belum jelas serta dukungan sumberdaya yang belum maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan adalah penetapan identitas setiap zona wisata, pengembangan atraksi wisata, dan pengembangan paket jalur wisata

Key words : *Implementasi kebijakan, izin usah pariwisata, Dinas kebudayaan dan priwisata, kota Medan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar. MBA, Bendahara Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Bapak Prof.Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Heri Kusmanto, MA, Direktur PPs Magister Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi MAP, sekaligus sebagai Pembimbing I.
5. Bapak Drs. Done Ali Usman , MAP, sebagai Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih pula kepada kedua orang tua dan keluarga, yang senantiasa memberi dorongan dengan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis. Dan teristimewa kepada Istri tercinta **Dr. Kamaril Rahma Dianti** yang terus memberikan dorongan dan motivasi sehingga thesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan kepada anak - anakku **Sayyid Sabiq SM Rambe** dan **Alfriska Hidayana Rambe** semoga tulisan ini menjadi motivasi agar senantiasa belajar dengan giat dan rajin.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, Agustus 2008

Penulis

Mohd. Amin Rambe

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	
ii	
ABSTRAKSI	
iii	
KATA PENGANTAR	
iv	
DAFTAR ISI	
vi	
DAFTAR TABEL	
vii	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik.....	6
2.2. Implementasi Kebijakan	8
2.3. Implementasi Kebijakan Fiskal Indonesia	18
2.4. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.....	18
2.5. Retribusi Daerah.....	21
2.6. Retribusi Izin Usaha Pariwisata	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian.....	35
3.2. Lokasi Penelitian.....	35
3.3. Populasi dan Sampel	35
3.4. Rencana Sampling	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data	36
3.6. Operasionalisasi Variabel.....	37
3.7. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN

4.1. Profil Kota Medan	40
4.2. Pariwisata Kota Medan.....	48
4.2.1. Potensi Objek Wisata	50
4.2.2. Kunjungan Wisatawan.....	51
4.2.3. Struktur Organisasi.....	56
4.2.4. Visi dan Misi	59

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1. Hasil Penelitian.....	64
5.1.1. Karakteristi responden	64
5.1.2. Variabel Penelitian	67
5.2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi	80
5.3. Upaya-upaya Peningkatan Pariwisata	82

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	88
6.2. Saran - Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Penyebaran Objek Wisata Di Kota Medan.....	50
4.2	Jumlah Wisatawan yang Datang ke Kota Medan Tahun 2003-2006.....	52
4.3	Proporsi Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang Menginap.....	53
4.4	Rata - Rata Lama Menginap Wisatawan Nusantara dan Mancanegara.....	54
4.5	Tingkat Hunian Hotel di Kota Medan.....	54
4.6	Data Sarana Pariwisata.....	55
4.7	Data Hiburan Umum	55
5.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	64
5.2	Distribusi Responden Menurut Umur.....	65
5.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	65
5.4	Distribusi Responden Menurut Kedudukan Dalam Program.....	66
5.5	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	67
5.6	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Tujuan Pajak Ijin Pariwisata.....	68
5.7	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan adanya Prangkat Aturan Dalam Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	69
5.8	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Tertulis Dalam Pelaksanaan Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	69

5.9	Pendapat Responden Tentang Pemahaman Peraturan Dalam Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	70
5.10	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumber Daya Manusias Dalam Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	71
5.11	Pendapat Responden Tentang Keahlian/Kemampuan Yang Dimiliki Komponen Pelaksana Dalam Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	72
5.12	Pendapat Responden Tentang Otoritas dan Wewenang Dalam Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	73
5.13	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumber Daya Dana Dalam Mendukung Kelancaran Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	74
5.14	Pendapat Responden Tentang Dukungan Prasarana Untuk Mendukung Kelancaran Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	75
5.15	Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Penyuluhan Dalam Pelaksanaan Program	76
5.16	Pendapat Responden Tentang Peranan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam Memberikan Penyuluhan dalam Pelaksanaan Program.....	76
5.17	Pendapat Responden Tentang Adanya Keterpaduan Komponen Pelaksana Dalam Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata.....	77
5.18	Pendapat Responden Tentang Adanya Pengaruh Dari Luar Yang Mempengaruhi Keterpaduan Komponen Pelaksana Kebijakan.....	78
5.19	Rata - Rata Skor Implementasi Kebijakan Restribusi Izin Usaha Pariwisata Di Kota Medan	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Medan selain merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara, juga mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan, dan pusat kegiatan pariwisata, serta merupakan pintu gerbang Indonesia bagian Barat dengan adanya pelabuhan laut Belawan, dan Bandar udara Polonia.

Sejalan dengan visi Kota Medan : **“Medan Kota Metropolitan Yang Modern, Madani Dan Religius”**. Kota modern yang akan diwujudkan adalah kota jasa, perdagangan, keuangan, dan pendidikan yang siap bersaing secara regional dan global dengan sistem lalu lintas keuangan yang efisien serta kompetitif dengan dukungan infra-struktur sosial ekonomi yang lengkap, pondasi per-ekonomian yang kuat, stabilitas keamanan, sosial - politik yang kondusif dan tata pemerintahan yang profesional serta pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia (sdm), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta iman dan taqwa (imtaq). Kota madani yang akan diwujudkan adalah kota yang beradab dan agamis sebagaimana tercermin dalam cara berfikir, sikap dan perilaku yang berbudaya, mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, kemajemukan, adil, terbuka, serta demokratis. Kota religius yang akan diwujudkan adalah kota dengan masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi nilai. ajaran agama sehingga

menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu makna pokok dari visi religius adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup beragama, antar umat beragama dan antar etnik serta antara umat beragama, etnik dengan pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual perkembangan kota yang demikian, tentunya menurut adanya titik pandang yang tepat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kota pada masa datang. Oleh karenanya pembangunan Kota Medan dalam ciri perkotaan yang memilikinya, dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro dan mikro. Dalam pendekatan Medan dalam ciri perkotaan yang memilikinya, dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro dan mikro. Dalam pendekatan makro, maka pembangun kota Medan didukung sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas baik secara regional maupun nasional. Sedang melalui pendekatan mikro, pembangunan kota Medan dipandang sebagai suatu kesatuan lingkungan yang berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk, permukiman, kesempatan kerja, prasarana dan sarana perkotaan, tata ruang serta berbagaimasalah mikro lainnya.

Melalui pendekatan makro yang dikembangkan, diharapkan pembangunan Kota Medan dapat tumbuh dan berkembang sebagai kota metropolitan dalam sistem perkotaan secara nasional sehingga berfungsi mendukung pemantapan struktur perekonomian nasional. Di samping itu pendekatan ini juga dimaksudkan agar dapat meninggalkan fungsi dan peran kota-kota sedang dan kecil agar lainnya yang berada

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1976, *Public Policy Making*, New York, Holt Rinechart and Winston.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, William N, 1994, *Public Policy Analysis; An Introduction*, Englewood Clifs, New Jersey, Prentice-Hall Inc, Indonesian Edition: Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kota Medan, 2002. *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata* .
- Pemerintah Kota Medan, 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 - 2026* . Bappeda Kota Medan
- Pemerintah Kota Medan, 2006. *Rencana Stretegis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2005-2010* . Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Republk Indonesia, 2004. *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, "*Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*", Jakarta, 20 Juni 2000, *kertas kerja*.
- Toha, Miftah, 2005, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, *Governance, Administration, and Development*, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, Samudra, 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

